

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dalam bab IV, alternatif kebijakan PPh Pasal 21 yang lebih menguntungkan adalah kebijakan PPh Pasal 21 digross up, karena perusahaan dapat membebaskan tunjangan pajak yang diberikan sebagai unsur beban dan tunjangan tersebut dikenakan PPh Pasal 21 bagi karyawan.

Kebijakan-kebijakan tersebut berpengaruh pada besar kecilnya take home pay dan selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial. Jika perusahaan menerapkan kebijakan PPh Pasal 21 di gross up, maka take home pay bagi karyawan yang terbesar, namun ini akan berdampak perusahaan akan menanggung selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial yang tidak berbeda dengan alternatif pertama dan alternatif ketiga yaitu PPh Pasal 21 ditanggung pegawai dan ditunjang perusahaan, perusahaan akan menanggung selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial yang merupakan selisih terbesar. Ditinjau dari segi komersial, biaya fiskal yang besar dari kebijakan PPh Pasal 21 yang di gross up tersebut tampak seperti pemborosan, namun harus juga diperhatikan bahwa akibat biaya fiskal yang besar tersebut akan berdampak kepada laba sebelum pajaknya akan menjadi lebih kecil, sedangkan dari sudut pandang karyawan, dengan diterapkannya kebijakan PPh Pasal 21 digross up, gaji yang dibawa pulang (take home pay) merupakan yang terbesar.

---

Jika dilihat dari jumlah selisih biaya fiskal dan biaya komersial dari kebijakan PPh Pasal 21 digross up, maka alternatif kebijakan ini menguntungkan karyawan karena perusahaan menanggung selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial yang lebih kecil dari alternatif kedua yaitu kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan dan tidak berbeda dengan alternatif pertama dan ketiga yaitu kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung pegawai dan ditunjang perusahaan. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan yang paling menguntungkan bagi perusahaan dan karyawan perusahaan dikaitkan dengan gaji yang dibawa pulang (take home pay) dan selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial adalah kebijakan PPh Pasal 21 di gross up.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil analisis atas keempat alternatif kebijakan PPh Pasal 21, yaitu:

1. Kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung pegawai.
2. Kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan.
3. Kebijakan PPh Pasal 21 ditunjang perusahaan.
4. Kebijakan PPh Pasal 21 digross up.

Penulis menyarankan agar PT Pupuk Kujang mengubah kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan yang selama ini digunakan dan menerapkan kebijakan PPh Pasal 21 digross up, karena kebijakan ini lebih menguntungkan perusahaan dan karyawannya dikaitkan dengan selisih biaya fiskal dan biaya komersial serta gaji yang dibawa pulang (take home pay) oleh karyawan.

---